

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

##### **4.1.1 Implementasi Program Jakpreneur dalam Pengembangan UMKM**

**Oleh Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat**

Berdasarkan penelitian yang berjudul **Implementasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Jakpreneur di Kota Administrasi Jakarta Pusat** diperoleh kesimpulan dari hasil pengamatan. Peneliti menarik kesimpulan Program Jakpreneur yang dilaksanakan oleh Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan program dijalankan sesuai dengan variabel keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Horn dan Van Meter di mana standar, sasaran, dan tujuan program serta sumber daya pendukung program berupa anggaran dan dukungan kelembagaan harus diperhatikan dalam pelaksanaannya.

##### **1. Standar, Tujuan, dan Sasaran Program**

Pelaksanaan program Jakpreneur sudah sesuai dengan standar, tujuan, dan sasaran dan penyelenggaraan program oleh Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai salah satu SKPD penyelenggara Jakpreneur. Pengembangan UMKM dilakukan melalui pemberian fasilitas sesuai dengan program 7P yang tercantum dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 yang terdiri dari Pendaftaran, Pelatihan, Pendampingan, Perizinan, Pemasaran, Pelaporan keuangan, dan Permodalan. UMKM yang telah tergabung memperoleh fasilitas melalui kegiatan pendampingan. Proses implementasi

belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini karena tujuan program Jakpreneur masih perlu usaha yang lebih besar dalam menciptakan wirausaha yang berkualitas. Tidak semua pelaku usaha yang bergabung dalam program ini aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan hal ini disebabkan UMKM didominasi oleh ibu rumah tangga. Selain itu masih rendahnya minat UMKM untuk mengikuti pelatihan karena rendahnya tingkat disiplin sehingga belum menjadikan UMKM untuk mandiri dan berdaya saing.

## 2. Sumber Daya Kebijakan

Sumber daya kebijakan dalam hal ini anggaran pada program Jakpreneur dapat dialokasikan dengan maksimal melalui pemaksimalan penyerapan anggaran mencapai 96,88%. Selain itu, sumber daya kebijakan juga dilakukan dalam bentuk dukungan kelembagaan yang diberikan melalui pemasaran, peningkatan sumber daya manusia, dan teknologi serta pemberian fasilitas perizinan. Kegiatan tersebut dikatakan sudah terlaksana dengan baik melalui proses pendampingan. UMKM binaan pada penelitian ini merasakan manfaat yang diberikan melalui fasilitas yang diberikan melalui kegiatan pelatihan, perizinan, dan pemasaran yang didapatkan secara gratis. Meskipun demikian, Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat masih kurang gencar dalam melakukan sosialisasi Jakpreneur untuk menjangkau masyarakat terutama wirausaha muda karena banyak dari UMKM binaan yang mengetahui program dari teman atau saudara.

#### **4.1.2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Jakpreneur Kepada Pelaku UMKM di Jakarta Pusat**

Berjalannya program tidak lepas dari adanya penghambat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia menyebutkan penghambat dalam pengembangan UMKM, yaitu sumber daya manusia dan peran serta *stakeholder*. Melihat pelaksanaan pada Program Jakpreneur oleh Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat, peneliti menemukan penghambat yang terjadi dilapangan:

##### **1. Latar Belakang Pelaku Usaha**

Penghambat program Jakpreneur oleh UMKM binaan Jakpreneur, yaitu rendahnya kualitas dalam menjalankan usaha karena minimnya pengetahuan dan pengalaman. Selain itu tingkat kedisiplinan dan kemampuan teknologi yang masih kurang dikuasai, hal ini disebabkan UMKM binaan didominasi oleh ibu rumah tangga. Selain sumber daya manusia, modal juga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM binaan karena kondisi perekonomian yang terbatas. Hanya 4% dari jumlah UMKM binaan yang dapat memperoleh peminjaman modal karena permasalahan pada *BI Checking*. Permasalahan juga terjadi pada ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak mendukung tetapi didukung oleh Jakpreneur melalui pemberian sarana dan prasarana. Selain itu permasalahan lain muncul dari sisi pemasaran karena pasar yang sifatnya kompetitif baik dengan industri kecil dan industri besar dengan jumlah pesaing yang sangat banyak.

## 2. Peran *Stakeholder*

Peran Suku Dinas PPKUKM Jakarta Pusat pada pelaksanaannya melalui program Jakpreneur mengalami permasalahan pada peran pendamping. Pendamping belum mampu untuk melaksanakan perannya secara penuh kepada pelaku usaha, karena pengalaman yang terbatas dan jumlah ketersediaan pendamping yang tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang dibina. Kegiatan yang dijalankan memerlukan adanya kerjasama antar pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Koordinasi dilakukan dengan baik oleh pihak Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat terhadap seluruh pihak yang terlibat baik pemerintahan maupun pihak swasta selama berjalannya program Jakpreneur.

### 4.2. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan program Jakpreneur terkait Implementasi program Jakpreneur oleh Suku Dinas PPKUKM Jakarta Pusat, yaitu:
  - a. Meningkatkan kualitas UMKM binaan yang masih kurang berpengalaman dalam mengembangkan usaha sehingga UMKM dapat berdaya saing dan mandiri melalui pemberian motivasi oleh pendamping dan memberikan arahan agar pelaku usaha mengikuti kegiatan dengan serius terutama dalam pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelaku usaha.
  - b. Melakukan sosialisasi secara berkala yang mengarah kepada wirausaha muda agar dapat bergabung pada program Jakpreneur. Suku Dinas

PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat perlu merancang strategi yang dapat menarik minat generasi muda yang memiliki usaha untuk bergabung menjadi binaan Jakpreneur sehingga binaan Jakpreneur tidak hanya didominasi oleh Ibu Rumah Tangga saja.

2. Berdasarkan hasil penelitian terkait faktor penghambat pelaksanaan program Jakpreneur kepada UMKM binaan di Jakarta Pusat, peneliti memberikan saran:
  - a. UMKM harus memiliki kesadaran untuk lebih aktif dan disiplin dalam mengikuti kegiatan yang diberikan Suku Dinas PPKUKM Jakarta Pusat terutama dalam kegiatan pelatihan agar dapat meningkatkan kualitas UMKM untuk pengembangan usaha agar dapat bersaing dengan industri usaha lain. Selain itu Suku Dinas PPKUKM perlu menyediakan lebih banyak lokasi usaha yang mudah dijangkau konsumen untuk UMKM binaan Jakpreneur.
  - b. Suku Dinas PPKUKM Jakarta pusat perlu menambah jumlah pendamping dengan memperhatikan kualitasnya untuk memaksimalkan pemberdayaan yang dilakukan kepada UMKM binaan Jakpreneur.